

PRAKTIK URBAN TEKNO-POLITIK DI DKI JAKARTA: STUDI KASUS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) MASYARAKAT KAMPUNG TENGAH DAN KAMPUNG GEDONG MELALUI APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI)

Hendry Joveto, Irwansyah

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Email: hendry.joveto@ui.ac.id, irwansyah.ma@ui.ac.id

Abstrak

Bantuan Sosial (Bansos) merupakan bentuk kewajiban pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi Covid-19, sehingga informasi mengenai bansos menjadi hal yang penting untuk diakses masyarakat. Padahal masa Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terbatasnya ruang interaksi informasi antara masyarakat dan pemerintah, untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan adaptasi model pelayanan publik yang baru. Terkait informasi Bansos, tepat setahun sebelum pandemi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang diproyeksikan untuk menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi. Namun, inovasi yang diluncurkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini masih belum mempertimbangkan ketimpangan digital yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta menengah ke bawah. Fitur pengecekan BST dalam aplikasi JAKI pada kenyataannya masih belum dapat difungsikan secara optimal oleh masyarakat miskin kota dan tidak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan distribusi Bansos. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif untuk mengungkapkan fenomena kesenjangan akses informasi yang terjadi pada sejumlah penerima BST dengan meninjau dua daerah di Jakarta Timur yang merupakan daerah penerimaan bansos tertinggi. Peneliti akan menganalisis menggunakan teori urban tekno-politik dengan meninjau permasalahan yang terjadi melalui elemen-elemen utamanya. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa rezim urban tekno-politik telah mendorong pemerintah untuk mengedepankan penggunaan teknologi tanpa mempertimbangkan ketimpangan digital yang terjadi.

Kata kunci: pelayanan publik ; aplikasi teknologi ; bantuan sosial ; urban tekno-politik.

Abstract

Social Assistance (Bansos) is a form of obligation from the Jakarta Provincial Government to the economically affected community during the Covid-19 pandemic, making information about Bansos crucial for the public to access. However, the pandemic has resulted in limited interaction and information flow between the community and the government. To overcome this challenge, a new model of public services adaptation is needed. Regarding the Bansos information, exactly one year before the pandemic, the Jakarta Provincial Government launched the Jakarta Kini (JAKI) application, which was projected to become an integrated service application. However, the innovation introduced by the Jakarta Provincial Government did not consider the digital divide experienced by the lower-middle-class society in Jakarta. The BST (Bansos) verification feature in the JAKI application, in reality, has not been optimally functional for the urban poor and cannot prevent the misuse of Bansos distribution. Using a qualitative method, this research will gather qualitative data to uncover the phenomenon of information access gap experienced by a number of BST recipients by reviewing two areas in East Jakarta, which are the highest recipients of social assistance. The researcher will analyze this issue using the urban techno-politics theory by examining its key elements. The findings indicate that the urban techno-politics regime has driven the government to prioritize technology adoption without considering the existing digital divide.

Keyword: public service ; technology applications ; social assistance ; urban techno-politics.

1. PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah administratif di Indonesia yang telah menerapkan Smart City sejak 26 Desember 2014 dengan sebutan yang biasa dikenal sebagai Jakarta Smart City (JSC). Inisiatif Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan transformasi menjadi smart city ditujukan untuk mewujudkan kemudahan layanan publik berbasis Information and Communication Technology (ICT). Salah satu produk layanan JSC yang ditujukan bagi masyarakat dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di gawai elektronik, adalah Jakarta Kini (JAKI). JAKI merupakan aplikasi yang memiliki beragam fitur yang dapat memudahkan warga DKI Jakarta untuk mengakses informasi dan layanan yang tersedia secara digital. Mengacu pada website Smart City Jakarta, JAKI juga menjadi sarana informasi terintegrasi seluruh layanan yang dibentuk dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah pengecekan penerimaan bantuan sosial yang dapat dilakukan dengan memasukkan nomor NIK. Hal tersebut, diharapkan dapat mempermudah transparansi data dalam hal distribusi Bantuan Sosial. Menurut Taufik (2020) transformasi model pelayanan manual yang ditandai dengan pelayanan tatap muka ke elektronik telah mengalami peningkatan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan situasi pandemi yang telah mendorong pemerintah untuk terus melakukan pelayanan publik tanpa bertatap muka secara langsung. Transisi tersebut yang kemudian membuat aplikasi JAKI kemudian menjadi pilihan aplikasi utama oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk dapat menciptakan pelayanan publik secara digital di masa pandemi Covid-19.

Perubahan model pelayanan publik yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan bertransisi menjadi digital yang dilakukan oleh pemerintah juga diikuti dengan adaptasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan pelayanan tersebut. Hal ini berkaitan dengan fenomena ketimpangan digital yang sebelumnya sudah terjadi di DKI Jakarta yang kemudian menjadi tantangan bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan publik secara digital. Faktanya, akses internet yang tersedia di Jakarta belum dapat diakses secara merata oleh kelompok rentan (SMERU, 2020). Aplikasi JAKI sendiri telah diunduh lebih dari satu juta pengguna gawai, apabila dibandingkan dengan 10,56 juta penduduk Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2020), maka angka unduhan aplikasi JAKI masih terhitung rendah. Survei lainnya juga menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat DKI Jakarta terhadap aplikasi JAKI masih terhitung rendah dengan hanya 59,4% masyarakat DKI Jakarta mengetahui aplikasi tersebut (Andriyanto et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi JAKI di DKI Jakarta masih belum dapat terlaksana secara maksimal dan menyeluruh.

Ketimpangan akses informasi yang dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta terhadap aplikasi JAKI menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat miskin kota. Pada faktanya, penyaluran BST di Jakarta, masih ditemukan banyak penyelewengan yang terjadi di lapangan. Hingga Februari 2020, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial mencatat terjadi sekitar 1.409 penyelewengan dan salah sasaran distribusi bantuan sosial tunai atau BST di wilayah DKI Jakarta (Haryanti, 2021). Dalam menanggulangi hal tersebut, pemerintah DKI Jakarta berupaya untuk dapat memberikan informasi mengenai penerimaan Bansos kepada masyarakat melalui aplikasi JAKI. Aplikasi JAKI menyediakan fitur pengecekan penerimaan Bansos yang dilakukan dengan memasukkan NIK ke dalam aplikasi. Masyarakat penerima

bansos diharapkan dapat mengetahui informasi penerimaan Bansos dengan memanfaatkan fitur tersebut. Namun, pada faktanya fasilitas tersebut masih belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima Bansos yang mayoritas merupakan masyarakat miskin kota.

Implementasi JAKI yang tidak maksimal memunculkan permasalahan baru yang dapat ditemukan di beberapa daerah di DKI Jakarta dengan penyaluran Bansos yang cukup tinggi, seperti Jakarta Timur. Dalam temuan di beberapa daerah penerima Bansos di Jakarta Timur, seperti Kampung Gedong dan Kampung Tengah, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi masyarakat di daerah tersebut yang membuat masyarakat tidak dapat memanfaatkan fitur JAKI untuk dapat mengecek penerimaan Bansos. Pada dasarnya, upaya Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk dapat mendorong sistem digital dalam pelayanan publik tidak dapat mempertimbangkan faktor aspek-aspek yang tumbuh di kalangan masyarakat miskin kota di daerah Kampung Gedong dan Kampung Tengah. Pelayanan publik yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah, pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan dan membuat masyarakat miskin kota harus mencari informasi yang datang melalui inisiatif masyarakat setempat.

Fenomena yang terjadi di Kampung Gedong dan Kampung Tengah merupakan bagian dari bentuk kebijakan publik berbasis teknologi yang terbentuk melalui perkembangan teknologi di lingkup perkotaan. Studi Urban Tekno-Politik menaruh hubungan teknologi dengan manusia yang dikaitkan dalam lingkup perkotaan (Hecht, 2009). Pengaturan hubungan masyarakat dengan pelayanan publik berbasis teknologi pada akhirnya memperbesar ketimpangan digital yang berdampak pada kesenjangan informasi di kalangan masyarakat miskin kota di Kampung Gedong dan Kampung Tengah.

Penyatuan teknologi dan tujuan politik merupakan salah satu dari aspek urban-teknopolitik yang membentuk imajinasi untuk dapat menyatukan teknologi dengan program politik yang tersirat di dalamnya (Folley, 2020) Maka, dampak perkembangan rezim yang ada akan berpengaruh terhadap hasil akhir kebijakan yang terbentuk. Berkembangnya rezim tekno-politik dalam kasus ini akan dapat menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah kota merupakan bagian dari pengaruh rezim tekno-politik yang tidak mempertimbangkan fenomena ketimpangan digital yang terjadi di masyarakat dan pada akhirnya menciptakan kesenjangan informasi di kalangan masyarakat miskin kota. Dalam kasus ini Pemerintah DKI Jakarta telah mengutamakan teknologi dengan mengabaikan permasalahan ketimpangan digital yang terjadi di kalangan masyarakat miskin kota dan kaum marginal. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian, Bagaimana rezim Urban Techno-Politics di DKI Jakarta dapat berdampak pada ketimpangan akses informasi BST melalui digitalisasi pelayanan publik di aplikasi JAKI untuk masyarakat miskin kota di Kampung Tengah dan Kampung Gedong pada masa pandemi COVID-19?

2. METODE PENELITIAN

Riset kualitatif diharapkan dapat menjadi aktivitas yang disituasikan untuk dapat menjadi pengamat dari fenomena yang sedang terjadi. Dalam riset kualitatif terdapat berbagai interpretasi, praktik secara material yang dapat membantu untuk dapat memperlihatkan fenomena secara holistik fenomena (Ritchie dan Lewis, 2003). Dengan menggunakan

penelitian studi kasus, penulis akan menghasilkan penjelasan yang detail, sensitif terhadap konteks, dan dapat menjelaskan proses yang kompleks dari suatu fenomena sosial (Neuman, 2014). Pemilihan informan akan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dengan memperhatikan kualifikasi informan dengan informasi yang ditargetkan oleh peneliti. Ketika melakukan pencarian informan untuk mengumpulkan data, peneliti akan menentukan gatekeeper sebagai pihak yang mempunyai otoritas informal maupun formal dalam mengontrol akses di lapangan penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode wawancara dengan melibatkan informan dari dua daerah di Jakarta Timur yang merupakan daerah dengan penyaluran BST terbesar, yaitu Kampung Tengah dan Kampung Gedong. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui efektivitas dari program Bansos serta efektivitas penggunaan JAKI di daerah tersebut. Informan dari tiga daerah tersebut didapatkan melalui Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) yang merupakan organisasi akar rumput masyarakat miskin kota dan melakukan advokasi serta aksi kolektif membantu masyarakat miskin kota pada masa pandemi. Dalam wawancara di tiga daerah tersebut, penulis mewawancarai ketua RT/RW serta warga daerah setempat yang mendapatkan BST dan menanyakan hal seputar pengetahuan warga mengenai JAKI dan program Bansos oleh pemerintah setempat. Sedangkan untuk mengetahui skema aplikasi JAKI dalam menerapkan pengecekan BST, Diskominfo DKI Jakarta menjadi informan yang memberi keterangan terhadap proses pembentukan implementasi kebijakan sebagai pihak pengembang aplikasi JAKI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urban Regime dan Rezim Urban Tekno-Politik

Teori Urban Regime berfokus pada bagaimana pemerintahan di kota bekerja dengan memperhatikan tekanan pada pengaturan informal yang memungkinkan sebuah kota berfungsi sebagaimana mestinya. Urban regime berpandangan bahwa pemerintah kota mempunyai kondisi dependensi mutual. Bahwa pada dasarnya, kota merupakan tempat komersial yang secara jelas tidak dapat berkembang tanpa adanya investasi dan praktik sektor privat. Maka berdasarkan asumsi tersebut, sektor privat memerlukan investasi dalam sektor kebijakan yang dapat berkontribusi terhadap keuntungannya. Stone (1989) mendefinisikan *Urban Regime* sebagai pengaturan informal oleh badan publik dan kepentingan sektor privat untuk dapat mengatur secara bersamaan untuk dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang mengatur.

Urban regime yang dikembangkan oleh Stone menggunakan identifikasi rezim yang berbeda untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah hasil akhir dari kebijakan. Stone (1993) mengembangkan tipologi rezim seperti rezim pemeliharaan, rezim pembangunan, rezim kelas menengah progresif. Rezim pemeliharaan menggambarkan rezim yang tidak memerlukan upaya untuk perubahan yang signifikan. Rezim pemeliharaan tidak membutuhkan banyak upaya dan mencoba untuk mempertahankan hal yang ada. Sedangkan rezim pembangunan merupakan rezim yang menaruh perhatian pada pertumbuhan untuk mengurangi kemunduran dari rezim tersebut. Berbeda dengan Rezim pemeliharaan, Rezim ini menaruh upaya yang besar

untuk meningkatkan standar sosial dan ekonomi dengan melibatkan investasi dalam kebijakan publik yang ada. Dalam upaya untuk mempengaruhi aktor bisnis dalam menyalurkan sumber daya mereka, rezim ini harus meyakinkan sektor privat bahwa perubahan positif dapat dilakukan. Dalam memastikan kepercayaan tersebut, maka serangkaian tindakan politik perlu dilakukan oleh pejabat pemerintah kota. Salah satu tindakan tersebut dapat dengan menguasai tanah, membangun infrastruktur atau dalam kasus ini menguasai infrastruktur digital dalam skema *smart city*. Berbeda dengan rezim pembangunan, rezim kelas menengah progresif lebih menaruh perhatian pada pembangunan dengan melakukan pengawasan pada elit yang kemudian memunculkan restriksi serta sanksi dalam praktiknya. Rezim ini juga lebih menempatkan relasi pemerintah dan bisnis pada bentuk koersif, berbeda dengan rezim pembangunan yang cenderung mempunyai hubungan sukarela.

Perkembangan studi urban regime kian berkembang dan menaruh perhatian terhadap perkembangan zaman yang terjadi di lingkup kota. Salah satunya adalah tipologi *urban regime* yang dikemukakan oleh Jill Clark yang memperluas definisi tipologi *urban regime*. Menurutnya, urban regime yang dikembangkan oleh Stones masih tidak dapat memberikan studi komparatif yang komprehensif terkait aktor dan institusi. Maka, Jill Clark mengembangkan tipologi rezim yang didasarkan pada kehadiran ataupun tidak hadirnya peran pemerintah dalam membuat keputusan terhadap pembangunan dan pembagian keuntungan. Tipologi urban regime oleh Jill Clark (2001) mempunyai enam tipologi yang tidak hanya menjelaskan tentang aktor tapi juga membahas tentang basis institusi dan ide. Rezim pertama adalah *entrepreneurial regimes* yang berfokus pada relasi bisnis dan pemerintah yang diasumsikan sebagai manajer dari kepentingan komunitas dan tidak mempunyai konflik terhadap subsidi bisnis di kota. Dalam rezim ini justru diasumsikan bahwa pejabat kota mempunyai motivasi politik.

Tipologi kedua merupakan *caretaker and player regimes* yang menaruh fokus kepada kepemimpinan gubernur dalam mengatur hubungan antara pembangunan dan kepentingan lainnya dalam sebuah rezim. Respon gubernur dalam mengatur tensi antara kedua hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, kekuatan aliansi seorang gubernur dan tingkat partisipasi masyarakat kota. Rezim Ketiga merupakan rezim *stewardship* atau yang disebut sebagai pelayanan yang berarti bahwa terdapat obligasi dari sebuah bisnis untuk dapat melakukan pertukaran sumber daya yang dapat menguntungkan bagi keduanya. Lalu rezim ketiga adalah rezim progresif yang tidak membicarakan mengenai obligasi sebuah bisnis terhadap komunitas atau peran pemerintah, melainkan berfokus pada alokasi keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah kepada berbagai kelompok atau area di kota. Rezim kelima adalah rezim aktivis yang merupakan rezim yang didalamnya terdapat aktivitas koalisi yang terbentuk dari kelompok minoritas yang mendorong dibentuknya kebijakan afirmatif dalam lingkup kota. Rezim keenam adalah rezim *demand-side* yang berfokus pada kebijakan untuk dapat memberikan keuntungan kepada kelompok yang membutuhkan seperti kelompok minoritas, hal ini dapat terwujud melalui organisasi akar rumput yang bertumbuh di lingkup kota.

Perkembangan studi urban rezim yang terus berkembang pada dasarnya masih belum mempertimbangkan perkembangan teknologi yang kini marak digunakan oleh aktor pemerintah kota untuk menunjang pelayanan publik dan sektor lainnya. Folley dan Miller (2020) mengembangkan konsep *Urban-Techno Politics* yang dioperasikan dalam rezim

techno-politics yang didalamnya terdiri dari institusi, kumpulan orang, program politik, praktik industri dan ideologi institusional yang mengatur perkembangan teknologi dalam mengejar teknopolitik (Folley dan Miller, 2020). Munculnya rezim tekno-politik dipercaya dapat membentuk kembali kota-kota dengan infrastruktur yang mempertimbangkan investasi, sistem energi terbarukan dan desain ekologi. Perencanaan kota dan desain perkotaan membutuhkan pendekatan infrastruktur baru, dengan mengedepankan produksi, risiko teknologi dan keterlibatan publik. Tekno-politik menjelaskan tentang pengaruh dari bentuk *socio-technical system* yang ada dalam lingkup urban. Rezim tekno-politik menaruh fokus pada agensi yang terdistribusi namun beroperasi terhadap satu tujuan politik tersendiri. Maka terdapat ide politik dan relasi kekuasaan yang tertanamkan dalam penggunaan teknologi (Hecht, 2009).

Memahami kaitan antara kedua rezim yang dikembangkan pada awalnya oleh Stones (1989) dan dikembangkan oleh Clark (2001) serta munculnya rezim tekno-politik oleh Foley (2020) menunjukkan hal yang sama dalam memahami relasi bisnis dengan masyarakat kota yang kemudian berpengaruh terhadap peran aktor dan institusi dalam mengatur kebijakan dalam lingkup perkotaan. Rezim kelas menengah progresif oleh Stones menunjukkan bahwa terdapat upaya dan kekuatan kolektif masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap restriksi kebijakan serta rezim *entrepreneurial* menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota yang melihat aktor bisnis sebagai manajer dari kepentingan komunitas. Meskipun demikian, kedua rezim masih belum dapat mengintegrasikan nilai sosial dengan pertumbuhan teknologi yang kemudian akan menjadi tantangan dalam sebuah rezim yang berkembang di kota. Beberapa riset sebelumnya menunjukkan bahwa konsep urban tekno-politik berhasil mengungkap dampak dari kebijakan berbasis teknologi yang dibentuk oleh rezim tekno-politik.

Dalam risetnya mengenai partisipasi masyarakat Phoenix Arizona, Foley et al. (2020) menunjukkan bahwa eksklusif peran masyarakat terhadap keputusan mengenai tempat pembuangan limbah beracun yang ditinjau melalui konsep urban tekno-politik. Apabila ditinjau menggunakan pembingkai urban tekno-politik akan mendemonstrasikan bagaimana keputusan masa lalu dan nilai yang berkembang akan mempengaruhi tindakan dan sikap yang dilakukan pada masa kontemporer. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembingkai urban tekno-politik dapat menunjukkan eksklusif peran masyarakat dalam menentukan kebijakan yang didominasi oleh ahli teknologi. Pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan kebijakan juga menjadi fokus dari penelitian ini yang berusaha meninjau ketimpangan digital dengan perspektif urban tekno-politik. Eksklusif peran masyarakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembentukan infrastruktur digital yang berdampak pada kesenjangan informasi kepada masyarakat miskin kota.

Setidaknya terdapat lima elemen utama yang menjadi fokus utama dalam urban Tekno-politik yaitu, pertimbangan terhadap nilai-nilai sebelumnya, pengalaman kontemporer, wacana masa depan; siapa yang memiliki agensi untuk membuat keputusan; bagaimana agensi diperluas melalui kekuasaan dan otoritas untuk menjaga stabilitas sebagai respons terhadap visi alternatif (Folley, 2020). Dengan meninjau elemen utama dari urban tekno-politik, penelitian ini akan berusaha untuk meninjau permasalahan yang terjadi dan dampaknya terhadap respon masyarakat miskin kota dalam menanggapi perubahan teknologi yang kian menjadi masalah di lingkungan mereka. Elemen yang ada di dalam urban tekno-politik akan ditinjau melalui Studi kasus dalam dua lokasi yaitu Kampung Tengah dan kampung Gedong untuk dapat mengetahui

bagaimana perkembangan urban tekno-politik yang muncul berdampak pada kesenjangan informasi yang terjadi akibat tindakan institusi pemerintah daerah DKI Jakarta yang tidak mempertimbangkan ketimpangan digital yang telah terjadi.

Pada dasarnya, kesenjangan informasi diakibatkan oleh inovasi pemerintah daerah DKI Jakarta yang tidak mempertimbangkan fenomena ketimpangan digital di kalangan masyarakat miskin. Ketimpangan digital dalam hal ini dilihat sebagai hasil kebijakan dari rezim tekno-politik yang muncul akibat praktik tekno-politik yang berkembang di lingkup kota. Ketimpangan digital tidak hanya disebabkan oleh faktor perkembangan teknologi atau ekonomi, namun juga diakibatkan oleh faktor politik yang mengelilingi inovasi yang didalamnya tersirat program politik ataupun tujuan politik (Milner, 2006). Maka, meninjau kemunculan rezim tekno-politik akan menunjukkan dampak rezim yang menciptakan ketimpangan digital terhadap masyarakat miskin kota yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan informasi. Rezim tekno-politik sendiri terdiri dari infrastruktur dan teknologi lainnya, ideologi, serta jaringan institusi, praktik-praktik mereka, dan modal yang dapat mereka mobilisasi: sebuah rezim yang secara fundamental dibentuk oleh pilihan-pilihan masa lalu dan kondisi politik-ekonomi saat ini (Miller, Weber dan Roger, 2017).

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa rezim tekno-politik sebagai sebuah rezim yang mendorong perubahan teknologi dalam lingkup kota yang didalamnya terdapat sistem yang beroperasi dengan sebuah tujuan politik. Dengan mengedepankan penerapan teknologi terhadap publik dan mengintegrasikannya dengan nilai sosial yang ada di masyarakat akan memunculkan masalah baru terhadap proses urban, kebijakan dan infrastruktur dalam lingkup perkotaan (Foley et al, 2020). Permasalahan terhadap integrasi teknologi dengan kehidupan masyarakat kota akan berpotensi untuk menghilangkan pengetahuan masyarakat miskin kota terhadap informasi yang tersebar melalui media teknologi. pengetahuan mengenai teknologi hingga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat miskin kota akan menjadi masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini.

Kampung Tengah dan Kampung Gedong di Masa Pandemi COVID-19

Pada tahun 2020, pemerintah DKI Jakarta menerapkan PPKM untuk pertama kalinya setelah penularan virus Covid-19 menjadi semakin meningkat. Dalam upayanya untuk meredam penularan Covid-19, pemerintah diwajibkan untuk dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19. Salah satu upaya ini kemudian memunculkan permasalahan baru di kalangan masyarakat miskin kota. Untuk dapat mendapatkan hak Bantuan Sosial, masyarakat miskin kota harus terdaftar dalam daftar penerima bantuan sosial. Namun, pemerintah DKI Jakarta masih belum mempunyai data yang akurat untuk dapat memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Pada bulan Juni hingga Agustus 2022, SPRI mencatat bahwa terdapat 8.484 kartu keluarga yang terdaftar sebagai penerima Bansos namun belum mendapatkannya hingga akhir tahun 2022. Data ini didapat oleh SPRI melalui pengecekan Bansos yang ada di website Kemensos dan Dinsos DKI Jakarta yang juga berada di dalam aplikasi JAKI (Situmorang, 2022).

Perbedaan jumlah penyaluran dengan penerimaan Bansos menjadi masalah yang kian kali terjadi di beberapa daerah miskin di DKI Jakarta. Seperti dua daerah di Jakarta Timur yang merupakan kota dengan jumlah penyaluran bansos tertinggi di DKI Jakarta, yaitu daerah Kampung Gedong dan Kampung Tengah. Kampung Gedong dan Kampung Tengah keduanya memperoleh penyaluran Bansos yang cukup tinggi. Namun, kedua daerah tersebut mengaku bahwa Bansos yang diberikan terkadang tidak tepat sasaran.

“Saya liat yang dapat orang-orang lama, sehingga tidak dapat sasaran..... saya tidak dapat juga nih. Kasiannya, yang lebih membutuhkan tidak dapat dan yang berkecukupan malah dapat. Secara aset yang dapat Bansos malah punya mobil, punya rumah” (Wawancara pribadi dengan Ibu Yanti, Masyarakat Kampung Gedong).

Selain tidak tepat sasaran, seringkali informasi mengenai daftar penerima Bansos juga tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, informasi mengenai bansos menjadi signifikan bagi masyarakat miskin kota. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua daerah mempunyai cara yang berbeda dalam menyebarkan informasi mengenai daftar penerima Bansos. Pada kenyataannya, kedua daerah tersebut menggunakan cara yang konvensional dalam upayanya untuk dapat menyebarkan informasi. Daerah Kampung Gedong mengaku mengetahui informasi mengenai bansos menggunakan poster yang ditaruh di beberapa lokasi yang sering dilewati warga. Sedangkan Kampung Tengah cenderung menggunakan metode door-to-door dalam menyampaikan informasi yang dibantu oleh Pemuda Pancasila dan perangkat RT. Informasi yang diberikan dapat lebih akurat dan lebih mudah oleh masyarakat mengingat bahwa situasi masyarakat setempat yang saling mengenal satu sama lain. Hal ini memunculkan sikap kepercayaan terhadap ketua RT dan RW, serta beberapa orang yang mempunyai pengaruh besar di daerah tersebut seperti anggota Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI). Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan dalam wawancara penelitian yang menyatakan bahwa,

“Banyak yang minta bantuan ke saya, kayak tadi buat minta cek KK di *google* dapat atau tidak Bansosnya” (Wawancara pribadi dengan Ibu Ito Anggota SPRI, Kampung Tengah).

“Ya datanya semuanya ada di RW, jadi ada nama-namanya. Waktu itu kan dapat undangan untuk ke kelurahan gitu” (Wawancara pribadi dengan Ibu Ira Masyarakat Kampung Gedong).

Kekuatan dan pengaruh beberapa figur di daerah tersebut dikarenakan lokasi kedua daerah yang menunjukkan bahwa masing-masing rumah yang berdekatan dan mempunyai profesi pekerjaan yang hampir sama. Dalam masa pandemi, kedua daerah melakukan pekerjaan seperti menjadi ojek online dan menyelesaikan pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan dirumah. Dikarenakan kebijakan PPKM, membuat interaksi di daerah menjadi lebih intensif dan membuat masyarakat cenderung lebih mempercayai satu sama lain dengan tindakan yang dilakukan secara kolektif. Beberapa RT bahkan mempunyai inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan selama masa pandemi.

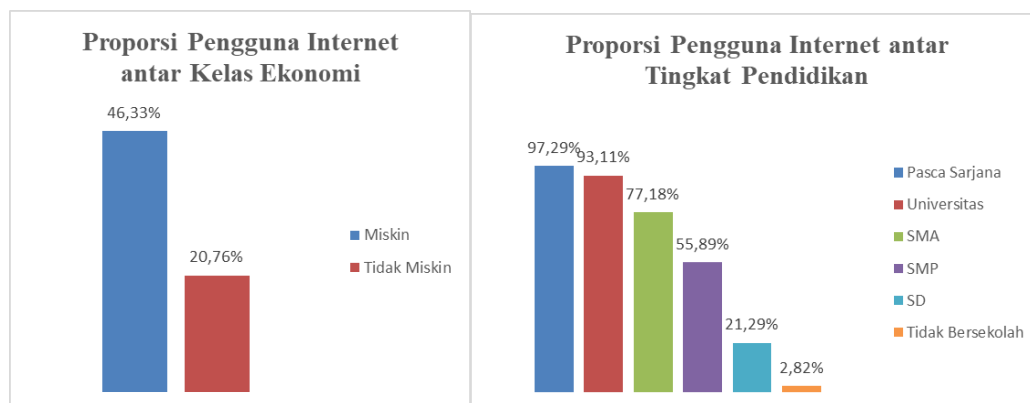
“Penyaluran BST agak bagus karena uang, tapi kalau Bansos ada yang kaya dan yang miskin.. yang orang susah malah tidak ada namanya, Tapi saya disini bagi rata untuk semuanya” (Wawancara pribadi dengan Ketua RW 05, Kampung Gedong Bapak Asit).

Tantangan Ketimpangan Digital di DKI Jakarta: Kampung Tengah dan Kampung Gedong

Berdasarkan data BPS (Statistik Telekomunikasi, 2019), seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta telah dijangkau oleh sinyal kuat telepon seluler. Sebanyak 96,69% rumah tangga telah memiliki telepon genggam dan 93,33% rumah tangga telah mengakses internet di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pada kenyataannya hal tersebut tidak menunjukkan peningkatan akses masyarakat pada layanan publik secara daring. Tantangan ketimpangan digital DKI Jakarta berada pada akses internet yang masih belum dapat diakses secara merata oleh perempuan, masyarakat miskin, lansia, dan penduduk dengan pendidikan rendah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh SMERU (2018) bahwa pengguna internet jauh lebih tinggi pada kelompok masyarakat yang mengenyam pendidikan lebih tinggi. Pada kenyataannya bahwa di Provinsi DKI Jakarta hanya 7,35% dari masyarakat yang tidak memiliki ijazah mengakses internet dan hanya 0,28% warga yang tidak dapat membaca mengakses internet. Pada dasarnya, dengan adanya dorongan untuk melakukan praktik social distancing pada masa pandemi Covid-19 maka masyarakat akan semakin bergantung pada penggunaan teknologi. Walaupun hingga 96,69% rumah tangga telah memiliki telepon genggam dan 93,33% rumah tangga telah mengakses internet di Provinsi DKI Jakarta, tetapi hanya sebagian kecil dari warga Jakarta yang telah mengunduh JAKI. Fenomena ketimpangan digital yang sebelumnya sudah terjadi di DKI Jakarta menjadi tantangan masyarakat dalam beradaptasi terhadap transformasi digital yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Figur 1

Proporsi Pengguna Internet Antar Kelas Ekonomi dan Tingkat Pendidikan



Sumber: SMERU, 2020

Berdasarkan dua daerah yang ditinjau, yakni Kampung Tengah dan Kampung Gedong mempunyai masalah yang sama dalam hal ketersediaan teknologi. Kedua daerah tersebut tidak dapat mempunyai sarana digital seperti gawai telepon yang dapat difungsikan untuk berbagai hal. Dalam satu kasus di kampung Gedong, beberapa masyarakat harus bergantian menggunakan gawai akibat keperluan sekolah, berdagang, dan berkomunikasi yang dilakukan hanya pada satu gawai telepon yang digunakan oleh satu keluarga. Ditemukan bahwa, dari kedua daerah walaupun hampir seluruh masyarakat sudah mempunyai gawai telepon, masih

sedikit yang mengetahui tentang keberadaan dan fungsi dari aplikasi JAKI. Sebagian besar masyarakat mengaku menggunakan gawai telepon mereka untuk berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp. Ketersediaan sinyal internet di ketiga daerah cukup kuat, walaupun terdapat beberapa kendala dalam harga kuota internet yang menjadi lebih mahal akibat penggunaan yang lebih meningkat pada masa pandemi.

Hingga akhir tahun 2020, Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial mencatat terjadi sekitar 1.409 penyelewengan dan salah sasaran distribusi bantuan sosial tunai atau BST di wilayah DKI Jakarta (Haryanti, 2021). Beberapa warga melaporkan bahwa masih terdapat pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh petugas. Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa, masih banyak ditemukan keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat menjadi penerima BST. Dengan banyaknya penyelewengan dalam penyaluran BST di DKI Jakarta, informasi mengenai penerima Bantuan Sosial tersebut menjadi satu hal yang cukup penting. Hal ini disebabkan oleh keluarga penerima Bantuan Sosial merupakan keluarga yang diusulkan dan direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang tepat. Penerima bantuan sosial sembako tahun 2020 hasil pembaruan dan pepadanan data Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, secara otomatis menjadi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Lebih lanjut, untuk dapat mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST) yang telah diberikan, penerima akan mendapat undangan terkait jadwal serta lokasi pendistribusian BST.

Ketika mengunjungi lokasi pendistribusian, penerima perlu membawa undangan distribusi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), baik yang asli maupun fotokopi (smartcity.jakarta.go.id). Berdasarkan hasil lapangan terhadap dua daerah yang teliti, skema tersebut masih menemukan beberapa masalah. Pertama, ketidaktepatan sasaran Bansos yang mengharuskan inisiatif masyarakat untuk saling membantu dan berbagai agar seluruh masyarakat dapat mendapatkan manfaat Bansos secara adil. Dalam beberapa kasus, ketua RT dan RW berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan untuk saling menginformasikan dan membantu bagi masyarakat yang tidak mendapatkan haknya dalam penerimaan Bansos. Ketiga daerah mengeluhkan skema baru yaitu Bantuan sosial Tunai (BST) yang tidak didapatkan walaupun sebelumnya warga sudah terdaftar mendapatkan Bansos dalam bentuk sembako.

Di sisi lain, Dinas Kemenkominfo DKI Jakarta mengakui bahwa masih adanya kesalahan data yang bersifat fatal dalam penghimpunan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta yang menyebabkan target BST menjadi tidak tepat sasaran di masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui pernyataan melalui wawancara di bawah ini,

“Mereka (Dinsos DKI) itu punya tim yang memang turun untuk mengecek dan mendata masyarakat. Tapi memang perlu diakui bahwa memang kemarin masih ada problem dari pihak Dinsos-nya yang mengatakan bahwa masih ada data yang tidak tepat sasaran” (Wawancara pribadi dengan Unit Smart City, Diskominfortik DKI Jakarta).

Masyarakat dari kedua daerah tersebut mengaku tidak dapat melakukan banyak hal untuk memperjuangkan haknya dalam mendapatkan Bansos. Walaupun sudah ada mekanisme pelaporan yang dibuka oleh Kelurahan untuk melaporkan masalah terkait distribusi, namun kenyataannya hal tersebut masih belum dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mencari tahu tentang informasi

bansos—seperti tanggal penerimaan dan jumlah dai penerimaan Bansos— melalui sosial media dan berita daring. Menurut beberapa warga, aplikasi JAKI dapat dimanfaatkan namun tidak secara eksplisit dapat menyelesaikan permasalahan distribusi. Beberapa ketua RT dan RW menggunakan aplikasi JAKI dikarenakan kewajiban untuk memberikan laporan yang telah diatur oleh kelurahan.

Rezim Urban Tekno-Politik di DKI Jakarta: Studi Kasus Kampung Gedong dan Kampung Tengah

Gopakumar (2020) menjelaskan bahwa rezim Tekno-politik telah berpengaruh pada semakin besarnya ketimpangan terhadap akses. Menurutnya, rezim tersebut telah mengubah dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada investasi dan efisiensi birokrasi yang lebih menguntungkan pihak kelas menengah ke atas dalam implementasinya. Berdasarkan tinjauan Folley dan Miller (2019) rezim tekno-politik kembali mengimajinasikan masyarakat dengan fokus kemunculan Socio-Technical System (STS) di mana teknologi dan infrastruktur, baik yang lama maupun yang baru, diimajinasikan kembali dan dibentuk kembali sebagai tanggapan terhadap masalah ekonomi, politik, dan lingkungan. Rezim tekno-politik perkotaan dikonsepsikan oleh Folley dan Miller terjadi akibat dampak *kekuatan global governance*, perusahaan multinasional, dan kebijakan nasional.

Perkembangan rezim urban tekno-politik terlihat melalui implementasi *smart city* di Jakarta melalui aplikasi JAKI. Aplikasi JAKI dikembangkan oleh Dinas kominfotik DKI Jakarta sebagai pengembang aplikasi menggunakan developer *in-house* berjumlah hingga sekitar 100 orang yang terbagi dalam beberapa aspek pekerjaan. Unit Jakarta Smart City mengembangkan berbagai platform yang kemudian diintegrasikan dalam aplikasi satu pintu untuk mempermudah proses birokrasi menjadi satu aplikasi saja. (Wawancara pribadi, 2022) Inisiasi JAKI sudah dibentuk sejak tahun 2018, dengan mempertimbangkan beberapa riset dan hasil survey masyarakat DKI Jakarta yang mengeluhkan akan sulitnya akses pelayanan publik melalui skema digital yang saat itu masih belum optimal. JAKI memprioritaskan untuk bekerja sama dengan seluruh Dinas di DKI Jakarta untuk memberikan informasi dan sosialisasi terhadap layanan yang disediakan oleh masing-masing dinas.

Diskominfotik DKI Jakarta menyatakan bahwa fitur pengecekan BST yang ada dalam aplikasi JAKI merupakan hasil dari kolaborasi Dinas Sosial DKI Jakarta dengan Diskominfotik. Menurutnya, hasil kerja sama tersebut memberikan ruang bagi Dinas Sosial untuk mendapatkan tampilan '*web-view*' yang dikembangkan oleh dinsos melalui situs website corona.jakarta.go.id. Diskominfotik tidak mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pendataan dan dalam memperbaiki sistem untuk penerimaan BST. Namun, Diskominfotik mengakui data Dinas Sosial yang masih belum tepat sasaran diakibatkan pengecekan data warga yang masih belum optimal. Hal ini menyebabkan beberapa masyarakat penerima Bansos dalam bentuk sembako menjadi tidak mendapatkan BST.

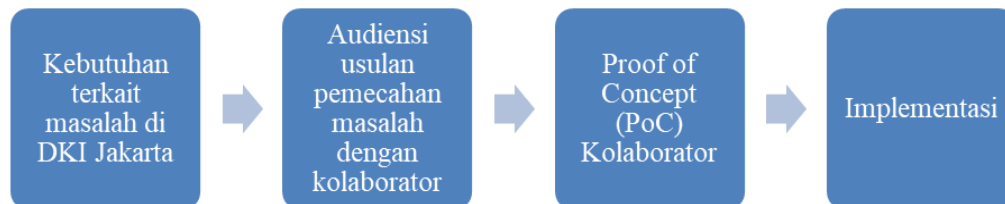
Rezim tekno-politik menunjukkan bahwa pengaruh STS dan fokus baru pemerintah dalam mengedepankan komputasi dan teknologi telah berpengaruh dalam transformasi digital yang diimplementasikan melalui aplikasi JAKI. Dalam konteks DKI Jakarta, Smart City yang didefinisikan oleh Colding (2021) sebagai penggabungan teknologi dan internet dengan

infrastruktur perkotaan termasuk pelayanan publik yang terkoordinasi dan terintegrasi menggunakan teknologi baru, pada faktanya telah hadir di DKI Jakarta melalui aplikasi. Walaupun demikian, prioritas rezim tekno-politik di DKI Jakarta menyebabkan kehadiran fungsi teknologi dalam pelayanan publik dengan tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Rezim tersebut telah berkontribusi dalam memperluas ketimpangan digital di masyarakat DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan melalui fitur Bansos yang mempunyai target utama masyarakat miskin DKI Jakarta, namun tanpa memperhatikan faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang merupakan faktor penting dalam membuka akses informasi kepada masyarakat miskin kota di DKI Jakarta.

Di sisi lain, pengembangan aplikasi disadari oleh pengembang JAKI tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah kota saja. Dalam usahanya meningkatkan kualitas pelayanan, maka pihak Jakarta Smart City (JSC) sebagai pengembang dari aplikasi JAKI membentuk program kolaborasi JSC. Program tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan pemecahan masalah di masyarakat dengan melakukan kolaborasi antar aktor privat dengan pemerintah kota melalui fitur yang dikembangkan di aplikasi JAKI. JSC dalam hal ini disebut sebagai penghubung terhadap kepentingan masyarakat dengan aktor privat yang dapat memberikan solusi.

Figur 2

Skema tahap kolaborasi dalam program kolaborasi JSC (Wawancara Pribadi, 2022)



Sumber: Wawancara Pribadi, 2020

Berdasarkan skema di atas, pemerintah kota berhasil menjadi penghubung terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat kepada aktor privat yang menjadi solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan aplikasi JAKI dengan aktor privat sebagai kolaborator untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan penggunaan teknologi. Hasil kolaborasi ini telah menciptakan beberapa program yang dikembangkan oleh JSC dengan beberapa perusahaan seperti *startup*. Salah satu contoh JSC sebagai penghubung adalah kolaborasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan startup pendidikan berbasis teknologi dalam mengembangkan aplikasi JAKI sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat DKI Jakarta.

4. KESIMPULAN

Informasi distribusi Bansos merupakan hal penting dalam masyarakat, terutama masyarakat miskin kota. Informasi tersebut merupakan hak masyarakat dalam keterbukaan

akses dan transparansi atas kewajiban pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan jaring pengaman di masa pandemi Covid-19. Informasi tersebut harus beradaptasi dengan pertimbangan transformasi pelayanan yang awalnya menggunakan skema tatap muka menjadi skema digital atau daring. Namun, masih terdapat fenomena ketimpangan digital yang terjadi di DKI Jakarta yang menjadi tantangan utama bagi pemerintah untuk menerapkan skema pelayanan tersebut. Di lain sisi, pengembangan Smart City sebagai hasil dari produk keputusan rezim tekno-politik justru telah memperbesar ketimpangan tersebut. Melalui fitur pengecekan BST yang dilakukan melalui aplikasi JAKI, masyarakat miskin kota semakin tidak dapat mengakses informasi tersebut secara transparan dan mudah. Sosialisasi yang dilakukan masih minim dan luput mempertimbangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di masyarakat penerima Bansos.

Permasalahan ini apabila ditinjau melalui perspektif urban regime oleh Stones dengan tipologi rezim kelas menengah progresif menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat di tengah krisis pandemi menjadi salah satu alternatif utama dari permasalahan yang muncul akibat hasil kebijakan rezim tersebut. Kekuatan komunitas dalam memberikan alternatif ditunjukkan melalui upaya komunitas seperti JRMK dan ketua RT/RW yang memberikan solusi terhadap kurangnya informasi bansos yang seluruhnya diintegrasikan dalam satu aplikasi yaitu, JAKI. Sedangkan, rezim entrepreneurial ditunjukkan melalui pengaruh aktor privat yang dalam hal ini memperluas pengaruhnya melalui integrasi aplikasi dalam JAKI yang didalamnya juga terdapat layanan pengecekan bansos. Sedangkan, JAKI diperlihatkan sebagai hasil dari produk kebijakan oleh rezim tekno-politik yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi menjadi visi pemerintah kota tanpa memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Elemen utama dari urban tekno-politik muncul dalam penelitian ini dengan memperlihatkan bagaimana nilai-nilai masa lalu, kejadian kontemporer, wacana masa depan berkontribusi pada operasi rezim tekno-politik yang menghasilkan tindakan pemerintah dan respon masyarakat dalam menanggapi kebijakan yang memprioritaskan teknologi dalam pelayanan publik. Nilai-nilai masa lalu yang berkembang masyarakat muncul dalam bentuk resiliensi masyarakat di masa pandemi dengan memanfaatkan kekuatan komunitas yang berkembang melalui masyarakat dan figur berpengaruh. Kejadian kontemporer memperlihatkan bahwa ketimpangan digital menjadi hal yang nyata terjadi di masyarakat dan berpotensi dapat mengeksklusi informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin kota. Visi masa depan memperlihatkan bahwa pemerintah DKI Jakarta dengan mengimplementasikan visi smart city melalui aplikasi JAKI berdampak pada meningkatnya ketimpangan digital.

Pemerintah kota DKI Jakarta juga bertindak sebagai pengembang aplikasi, hal ini menunjukkan elemen utama dari urban tekno politik tentang siapa yang memiliki agensi untuk membuat keputusan. Aplikasi JAKI menyerahkan tanggung jawab pemerintah kota dalam pelayanan publik pada pengaturan teknologi dengan memanfaatkan aktor privat sebagai agensinya. Walaupun fitur pengecekan bansos dikembangkan secara langsung oleh Diskominfotik DKI Jakarta dengan bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan pelayanan tersebut juga telah berpengaruh terhadap fitur pelayanan yang hadir melalui kolaborasi antara aktor privat dan pemerintah kota dalam upaya

pemecahan masalah di perkotaan yang dikembangkan melalui program kolaborasi Jakarta Smart City .

Kebijakan pengecekan bansos melalui JAKI menunjukkan sikap dan tindakan pemerintah DKI Jakarta dalam Rezim Tekno-Politik yang mengedepankan komputasi dan teknologi, tanpa mempertimbangkan situasi dan konteks masyarakat penerima Bansos. Situasi tersebut juga menunjukkan bahwa kerja sama dan peningkatan modal investasi menjadi sarana utama yang menghidupkan imajinasi Smart City yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakarta. Smart City yang mempunyai tujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat kota, justru menciptakan ketimpangan sosial dimana mayoritas masyarakat menengah ke atas yang hanya dapat mengakses fasilitas tersebut. Pemerintah DKI Jakarta juga memprioritaskan kolaborasi yang sebagian besar merupakan sektor privat yang berada dalam industri teknologi. Hal ini menunjukkan dependensi rezim yang mengedepankan kerjasama untuk dapat mengatur sumber daya dalam kota dengan melibatkan pihak eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, D., Said, F., Titiani, F., & Erni, E. (2021). Analisis Kesuksesan Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) Menggunakan Model Delone and McLean. *Paradigma-Jurnal Komputer dan Informatika*, 23(1), 41-46
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2020). Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020. Diakses pada 22 September 2021. melalui <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-pendud>.
- Clark, J. (2001). Six urban regime types: The effects of state laws and citizen participation on the development of alternative regimes. *Public Administration Quarterly*, 3-48.
- Corona Jakarta. Informasi Distribusi bantuan Sosial. Diakses pada 10 Oktober 2021 melalui <https://corona.jakarta.go.id/id/distribusi-bantuan-sosial>.
- Foley, R., & Miller, T. (2020). Urban techno-politics: *an introduction*. *Science as Culture*, 29(3), 309-318.
- Gopakumar, G. (2020) Regime of congestion: technopolitics of mobility and inequality in Bengaluru, India, *Science as Culture*, 29(3), pp. 345–364.
- Haryanti, R. (2021). "BST di Jakarta Diduga Diselewengkan, Ada Keluarga Kaya Dapat Bansos hingga Pungli". Diakses pada 16 Oktober 2021 melalui <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/16/19121611/bst-di-jakarta-diduga-diselewengkan-ada-keluarga-kaya-dapat-bansos-hingga>.
- Hecht, G. (2009) *The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity After World War II* (Cambridge, MA: MIT Press)
- Hommels, A. (2020). STS and the city: Techno-politics, obduracy and globalisation. *Science as Culture*, 29(3), 410-416.
- Jakarta Smart City. (2021). *Profil*. Diakses pada 10 Oktober 2021 melalui <https://smartcity.jakarta.go.id/new/profil>
- Jakarta Smart City. (2021). "Perkembangan dan Masa Depan Smart City Indonesia."

Diakses pada 10 Oktober 2021 melalui <https://smartcity.jakarta.go.id/events/501/perkembangan-dan-masa-depan-smart-city-indonesia>

- Judge, David. *Et.al.* (1998). *Theories of Urban Politics*. London: Sage Publication. 1998.
- Kurban, C., Peña-López, I., & Haberer, M. (2017). What is technopolitics? A conceptual schema for understanding politics in the digital age. *IDP. Revista de Internet, Derecho y Política*, (24), 3-20.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson Education Limited
- Puskapol UI. (2014). *Panduan praktis: Metode penelitian sosial*. Depok: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu: Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), LONTAR - Library Automation and Digital Archive.
- Shin, S.-Y., Kim, D., & Chun, S. A. (2021). Digital Divide in Advanced Smart City Innovations. *Sustainability*, 13(7), 4076. MDPI AG. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/su13074076>
- Smeru. (2020). *Catatan kebijakan Smeru: MEWUJUDKAN EKONOMI DIGITAL YANG INKLUSIF*. www.smeru.or.id
- Smith, J. M. (2019). Urban Regime Theory. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies*, 1-9.
- Stoker, G. (1998). Theory and urban politics. *International Political Science Review*, 19(2), 119-129.
- Stone, C. N. (1993). Urban regimes and the capacity to govern: A political economy approach. *Journal of urban affairs*, 15(1), 1-28.
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18.